

Pengabdian ASN Sebagai Wujud Kehadiran Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

**Maudhy Satyadharma¹, La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy², Asriyati³, Rahmawati Sahupala⁴,
Djoni Tepu⁵**

^{1,3,4} Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

² Dinas PUPR Kab. Konawe Kepulauan

⁵ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
email: maudhymaudhy@gmail.com ¹

(Diterima Juli 2026); Disetujui Agustus 2026); Dipublikasikan September 2026)

Abstrak

Penelitian ini menganalisis makna pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, khususnya sebagai wujud kehadiran negara melalui pelayanan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabdian ASN melampaui kewajiban administratif karena berorientasi pada kepentingan publik, keberlanjutan pelayanan, dan penerjemahan kebijakan negara di tingkat masyarakat. Pada wilayah berisiko, pengabdian dipengaruhi kondisi geografis, keamanan, sumber daya, kompetensi, kepemimpinan, dan dukungan organisasi. Pengabdian tidak identik dengan pengorbanan tanpa batas, sehingga negara perlu menyediakan perlindungan, fasilitas, manajemen risiko, dan dukungan kelembagaan agar ASN dapat menjalankan tugas secara aman, profesional, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : ASN, Kehadiran Negara, Pelayanan Publik, Pengabdian

Abstract

This study analyzes the meaning of service by State Civil Apparatus (ASN) personnel from the perspective of Government Science, specifically as a manifestation of the state's presence through public service. The research employs a qualitative approach utilizing literature reviews, document analysis, interviews, and field observations. The findings indicate that ASN service transcends mere administrative obligations, as it is oriented toward the public interest, service continuity, and the translation of state policies at the community level. In high-risk areas, such service is influenced by geographical conditions, security, resources, competence, leadership, and organizational support. Since service is not synonymous with limitless self-sacrifice, the state must provide protection, facilities, risk management, and institutional support to enable ASN personnel to perform their duties safely, professionally, and sustainably.

Kata Kunci : Civil Servants, State Presence, Public Service, Dedication

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Asriyati et al., 2025; Lastiwi et al., 2022; Satyadharma, 2026). Negara dapat merumuskan kebijakan, membangun regulasi, menyediakan anggaran, dan mengembangkan berbagai instrumen pelayanan, tetapi seluruh kebijakan tersebut pada akhirnya membutuhkan aparatur yang menjalankannya dalam kehidupan masyarakat (Ridwan & Sudrajat, 2020). Karena itu, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjalankan fungsi pemerintahan tersebut (Jamaluddin et al., 2025; Sunaini & Satyadharma, 2025).

Kerangka normatif tersebut memperlihatkan bahwa ASN tidak dapat dipahami hanya sebagai pegawai yang bekerja berdasarkan hubungan administratif dengan negara. ASN memiliki posisi sebagai aktor pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan menerjemahkan kebijakan negara ke dalam pelayanan konkret (Wahyudi, 2025). Dalam hal ini, pengabdian menjadi konsep penting untuk memahami hubungan antara aparatur, pemerintah, dan masyarakat.

Peristiwa yang menimpa aparaturnya ketika menjalankan tugas, termasuk kasus kekerasan terhadap ASN yang sedang melaksanakan pelayanan di wilayah tertentu, menunjukkan bahwa pengabdian aparaturnya dapat berlangsung dalam situasi yang tidak selalu ideal. Fenomena aktual mengenai kekerasan terhadap ASN di Papua memberikan ilustrasi mengenai dimensi risiko tersebut. Pada September 2026, tiga ASN di Kabupaten Jayawijaya menjadi korban penembakan ketika menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan tugas pelayanan kepada masyarakat. Aparat kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan selongsong peluru dari dua caliber (Arifin, 2026; cnnindonesia.com, 2026).

Pertanyaan tersebut memiliki relevansi kuat dalam Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan pada hakikatnya tidak hanya berbicara mengenai struktur, kewenangan, dan regulasi, tetapi juga mengenai bagaimana negara hadir dan bekerja melalui aparatur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Dewi & Suparno, 2022; Labolo, 2023). ASN menjadi salah satu wajah negara yang paling dekat dengan warga. Ketika seorang aparatur memberikan pelayanan kesehatan, mendistribusikan bantuan, mengurus administrasi kependudukan, mengawasi transportasi, mendampingi masyarakat, atau melaksanakan pembangunan di daerah terpencil, aktivitas tersebut pada saat yang sama merupakan bentuk konkret kehadiran negara (Mustofa et al., 2019). Dalam perspektif administrasi publik, gagasan tersebut berhubungan dengan public service motivation.

Perry dan Wise (Hakim & Hamid, 2021). memperkenalkan konsep tersebut untuk menjelaskan motivasi yang mendorong individu untuk bekerja dalam pelayanan publik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pada saat yang sama, konsep street-level bureaucracy dari Lipsky (Apriliani & Malawat, 2026) memberikan perspektif bahwa aparaturnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki posisi penting dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pelayanan. Aparatur garis depan menghadapi keterbatasan sumber daya, tuntutan masyarakat, aturan, dan kebutuhan untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menjalankan tugas (Agusta & Jaya, 2021). Dengan demikian, pengabdian ASN dapat ditempatkan pada titik temu antara motivasi pelayanan, tanggung jawab pemerintahan, implementasi kebijakan, dan kehadiran negara (Lumbanraja et al., 2025). Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis makna pengabdian ASN dalam perspektif Ilmu Pemerintahan; (2) mengidentifikasi dimensi yang membentuk pengabdian ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan (3) merumuskan kerangka konseptual pengabdian ASN sebagai wujud kehadiran negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan untuk memahami pengabdian ASN serta hubungan aparaturnya, pemerintahan, pelayanan publik, dan kehadiran negara (Syaipudin, 2025). Data bersumber dari regulasi, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, pemberitaan, informan, dan hasil observasi yang dipilih secara purposive. Analisis dilakukan melalui identifikasi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis konseptual. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode untuk menghasilkan model pengabdian ASN dalam perspektif Ilmu Pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ASN sebagai Orientasi Kepentingan Publik

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengabdian ASN memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar pelaksanaan kewajiban administratif. Kewajiban administratif menjelaskan apa yang harus dilakukan ASN berdasarkan tugas dan fungsi, sedangkan pengabdian menjelaskan orientasi mengapa tugas tersebut dilakukan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui dua konstruksi sederhana. Kewajiban administratif:

Tugas → Pelaksanaan → Output Pengabdian ASN:

Tugas → Pelayanan → Manfaat Masyarakat → Kepentingan Publik

Pengabdian dengan demikian memiliki orientasi hasil yang lebih substantif. ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memahami bahwa pekerjaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat (Jufri et al., 2026).

Dalam perspektif pemerintahan, orientasi tersebut menjadi penting karena pelayanan publik merupakan salah satu bentuk hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat. Semakin kuat orientasi kepentingan publik, semakin besar kemungkinan tugas administratif diterjemahkan menjadi pelayanan yang responsif. Pengabdian ASN karenanya dapat dipahami

Risiko merupakan bagian dari realitas penyelenggaraan pemerintahan. Risiko tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi dapat berupa kondisi geografis, keterbatasan akses, bencana, fasilitas yang terbatas, tekanan sosial, beban kerja, maupun kondisi lingkungan kerja (Elida, 2026; Nazila et al., 2026; Reppi et al., 2020). Wilayah berisiko dengan demikian tidak harus didefinisikan semata-mata sebagai wilayah konflik. Suatu wilayah dapat disebut berisiko ketika kondisi lingkungan secara signifikan meningkatkan tantangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan (Widiasih et al., 2024). Dimensi tersebut dapat meliputi:

- Kondisi tersebut mengubah pengalaman pengabdian ASN. Aparatur tidak hanya berhadapan dengan prosedur, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan konteks lapangan (Kombongan et al., 2026; Rajulan, Satyadharma, Hado, et al., 2026).

Salah satu temuan utama penelitian adalah hubungan antara pengabdian ASN dan kehadiran negara. Kehadiran negara tidak cukup dipahami sebagai keberadaan struktur pemerintahan secara formal. Negara menjadi nyata ketika masyarakat dapat merasakan fungsi pemerintahan melalui pelayanan, perlindungan hak, pembangunan, administrasi, dan penyelesaian masalah publik (Saggaf et al., 2018; Satyadharma et al., 2026).

ASN berada pada posisi penghubung. Kebijakan negara diterjemahkan melalui tindakan

aparatur, kemudian dirasakan masyarakat dalam bentuk pelayanan.

Dalam sudut pandang wilayah berisiko, hubungan tersebut menjadi semakin penting. Ketika aparatur tetap hadir menjalankan pelayanan dalam kondisi sulit, keberadaan pemerintah menjadi lebih nyata. Sebaliknya, apabila pelayanan pemerintah tidak mampu hadir karena berbagai hambatan, masyarakat dapat merasakan jarak antara institusi negara dan kebutuhan mereka (Katharina, 2021).

Oleh karena itu, pengabdian ASN dapat dipandang sebagai salah satu mekanisme mikro kehadiran negara yang menerjemahkan kebijakan publik menjadi pelayanan nyata, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Pengabdian Bukan Pengorbanan Tanpa Batas

Penggunaan istilah “pengabdian” dalam birokrasi perlu ditempatkan secara kritis. Pengabdian memang memiliki dimensi dedikasi, tetapi tidak boleh digunakan untuk membenarkan pengabaian terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan hak aparatur.

Terdapat perbedaan mendasar antara: Pengabdian = komitmen profesional untuk kepentingan public, dan Pengorbanan tanpa batas = tuntutan untuk menerima seluruh risiko tanpa dukungan negara. Perbedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan hubungan antara aparatur dan pemerintah.

ASN memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem kerja, sumber daya, fasilitas, perlindungan, dan dukungan organisasi yang memungkinkan tugas tersebut dijalankan secara layak (Fauzan, 2024).

Dengan demikian, pengabdian merupakan hubungan timbal balik kelembagaan: ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat ↔ Negara menyediakan ekosistem kerja yang memungkinkan pelayanan berlangsung. Perspektif ini menghindarkan penelitian dari romantisasi pengabdian. ASN yang menghadapi risiko tidak seharusnya hanya dipuji karena keberanian, tetapi juga perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang membutuhkan pengelolaan risiko (Syafitri et al., 2024).

Pengabdian ASN dan Keberlanjutan Pelayanan Publik

Pengabdian ASN memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan pelayanan publik. Pelayanan tidak dapat berlangsung hanya karena terdapat regulasi. Pelayanan membutuhkan manusia yang hadir, mengambil keputusan, berinteraksi dengan masyarakat, dan menyelesaikan persoalan (Pakudu, 2024).

Hal tersebut menjadi semakin jelas pada wilayah yang sulit dijangkau. Ketika ASN tetap hadir, masyarakat memiliki akses terhadap fungsi pemerintahan. Ketika ASN tidak dapat menjalankan tugas, terdapat kemungkinan terjadinya kekosongan pelayanan (Sutrisno, 2022). Dengan demikian, pengabdian ASN merupakan salah satu sumber daya institusional pemerintahan (Sjachrawy et al., 2025).

Namun, keberlanjutan pengabdian tidak dapat hanya bergantung pada karakter individu. Pemerintah perlu membangun sistem yang mendukung keberlanjutan tersebut melalui:

1. pemetaan risiko tugas;
2. dukungan sarana dan prasarana;
3. penguatan kompetensi;

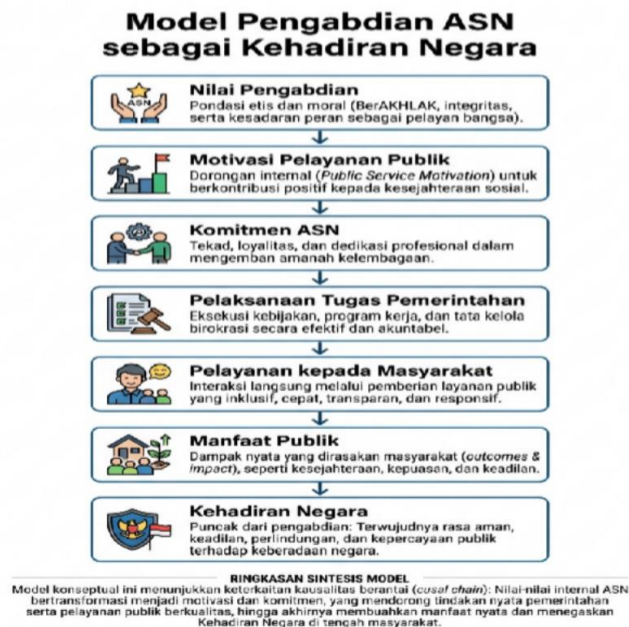
Pengabdian ASN Sebagai Wujud Kehadiran Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

4. kepemimpinan yang responsif;
5. dukungan psikososial;
6. koordinasi lintas sektor;
7. sistem penghargaan yang proporsional;
8. mekanisme perlindungan aparatur; dan
9. Evaluasi berkala terhadap kondisi kerja.

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan ASN harus bergeser dari paradigma “ASN harus siap mengabdikan dalam kondisi apa pun” menuju paradigma “negara menciptakan kondisi agar ASN dapat mengabdikan secara profesional dan berkelanjutan.”

Model Pengabdian ASN sebagai Kehadiran Negara

Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini mengusulkan model konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Model Pengabdian ASN sebagai Kehadiran Negara Sumber : Data diolah (2026)

Model tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan: Kondisi Wilayah + Kepemimpinan + Sumber Daya + Kompetensi + Dukungan Organisasi + Manajemen Risiko.

Dengan model tersebut, pengabdian ASN dapat dipahami melalui tiga tingkat yaitu; Pertama, tingkat individual. Meliputi motivasi, integritas, kompetensi, loyalitas, tanggung jawab, dan orientasi pelayanan. Kedua, tingkat organisasi. Meliputi kepemimpinan, budaya kerja, dukungan organisasi, fasilitas, koordinasi, dan manajemen risiko. Ketiga, tingkat pemerintahan. Meliputi kemampuan negara memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Model ini menghasilkan proposisi bahwa Pengabdian ASN yang didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai akan memperkuat keberlanjutan pelayanan publik dan memperkuat

persepsi masyarakat terhadap kehadiran negara. Proposisi tersebut dapat menjadi dasar penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris pada ASN yang bekerja di wilayah dengan karakteristik risiko berbeda.

PENUTUP

Pengabdian ASN merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi penghubung konkret antara negara dan masyarakat melalui pelayanan publik. Pengabdian mencakup orientasi kepentingan publik, tanggung jawab, profesionalisme, ketangguhan, dan keberlanjutan pelayanan, terutama di wilayah berisiko. Namun, pengabdian tidak berarti pengorbanan tanpa batas karena pemerintah berkewajiban menjamin lingkungan kerja yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, pengabdian ASN merupakan bagian dari kapasitas pemerintahan yang perlu didukung sistem kelembagaan agar kehadiran negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pemerintah perlu memperkuat perlindungan, dukungan organisasi, dan sistem keselamatan ASN di wilayah berisiko agar pengabdian berlangsung aman, profesional, berkelanjutan. ASN perlu memperkuat integritas, profesionalisme, ketangguhan, dan orientasi pelayanan publik sekaligus menjaga keselamatan serta keberlanjutan pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian selanjutnya perlu menguji model secara empiris melalui perbandingan wilayah berisiko berbeda serta mengembangkan indikator pengabdian ASN komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, E., & Jaya, I. (2021). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kualitas Kinerja yang Lebih Baik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643>
- Apriliani, & Malawat, S. H. (2026). Aksesibilitas Informasi dalam Pelayanan Publik dengan Perspektif Street-Level Bureaucracy di Kelurahan Guntung Payung Kota Banjarbaru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 18676–18685. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11744>
- Arifin, T. (2026). Penembakan ASN di Jayawijaya Dikecam dan Dinilai Melanggar Nilai Kemanusiaan. *Liputan 4*. <https://liputan4.com/penembakan-asn-di-jayawijaya-dikecam-dan-dinilai-melanggar-nilai-kemanusiaan/>
- Asriyati, Sahupala, R., Musa, I. L., Nasiru, A., & Satyadharma, M. (2025). Pembekalan Nilai-Nilai ASN Berakhlak dan Etika Birokrasi bagi Pegawai P3K UPTD Sarprashub LLAJ Wilayah Daratan Dishub Sulawesi Tenggara. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–9. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjpk/article/view/80>
- Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/jma/article/view/67>
- Elida, L. (2026). Sosiologi Mitigasi Bencana: Perspektif Sosial tentang Risiko, Kerentanan, dan Resiliensi Masyarakat. *Star Digital Publishing*.
- Fauzan, R. (2024). Menuju Aparatur Sipil Negara ASN Bertaraf Internasional. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 178–197. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i1.1348>

Hakim, A. A. A., & Hamid, N. (2021). Pengaruh Public Service Motivation dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2), 170–181. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2427>

Jamaluddin, Y., Nizhamul, N., & Pasha, S. (2025). *Birokrasi dan Governansi Publik*. CV Eureka Media Aksara.

Jufri, M., Adijah, A., & Rachim, E. (2026). *Workplace Learning: Strategi Cerdas Pengembangan Kompetensi ASN*. PT. Nas Media Indonesia.

Katharina, R. (2021). *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kombongan, S., Lambe, K. H. P., & Malissa, M. (2026). Analisis Kinerja ASN Melalui Sinergi Kompetensi, Disiplin Dan Budaya Kerja (Studi Fenomenologis Di Bappeda Kabupaten Nabire). *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistic*, 2(1), 26–32. <https://doi.org/10.1610/d71r8t26>

Labolo, M. (2023). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Lampouw, S. M., Satyadharma, M., & Hado. (2026). *Penguatan Pelayanan Publik melalui Inovasi Sistem Informasi Pelayanan Operator Kapal (SIP-OK) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3980–3991. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4869>

Lastiwi, D. T., Suryono, F., & Nihayati, B. Z. (2022). Strategi Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Arah Kebijakannya: (Sebuah Literature Review). *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 38–46. <https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.15>

Lumbanraja, V., Rustiyana, R., Ibrahim, A. H. H., & Riyanto, A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia: Konsep, Perkembangan, Prinsip dan Peran*. Star Digital Publishing.

Mustofa, A., Roekminiati, S., & Lestari, D. S. (2019). *Administrasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat*. Jakad Media Publishing.

Nazila, E., Agustina, L., & Armianti, M. (2026). Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Sebagai Upaya Pencegahan Konflik. *GENRES: Journal of General Studies and Research*, 1(2), 259–269. <https://genresjournal.com/genres/article/view/52>

Pakudu, R. (2024). *Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik yang Efektif*. Mega Press Nusantara.

Rajulan, M., Satyadharma, M., Hado, Nasrul, & Mursalim, S. (2026). Tata Kelola Program Mudik Gratis sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Publik di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 5(1), 24–32. <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/154>

Rajulan, M., Satyadharma, M., Suhartono, A., Hado, & Sulisty, G. A. (2026). Reflection on National Defense Day: Nationalism From the Perspective of Equitable Transportation in Southeast Sulawesi Province. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 6(1), 18–32. <https://doi.org/10.47200/aossagcj.v6i1.3533>

Reppi, B., Sumampouw, O. J., & Lestari, H. (2020). Faktor-faktor Risiko Stres Kerja pada Aparatur Sipil Negara. *Sam Ratulangi Journal of Public Health*, 1(1), 033. <https://doi.org/10.35801/srjoph.v1i1.27276>

Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.

- Saggaf, S., Said, M. M., & Saggaf, W. S. (2018). Reformasi Pelayanan Publik di Negara Berkembang (Vol. 1). Sah Media.
- Saleh, C., Islamy, M. I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur. Universitas Brawijaya Press.
- Satriadi, S., & Marlinda, M. S. D. C. (2025). Metode Pengabdian Kepada Masyarakat. Cv. Azka Pustaka.
- Satyadharma, M. (2026). Sumber Daya Manusia Adaptif dalam Menghadapi Tantangan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Kajian Literatur). *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, 5(1), 59–68. <https://www.jurnal.stiakdmerauke.ac.id/index.php/jakd/article/view/159>
- Satyadharma, M., Palupi, M. P., Oktaviani, S., Abdulhadi, D., Ibrahim, A. H. H., Sjachrawy, L. O. M. I., & Hasina, H. (2026). Pelayanan Publik: Konsep, Strategi dan Inovasi. Star Digital Publishing.
- Sjachrawy, L. O. M. I., Thasman, T., Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado, H. (2025). Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52. <https://doi.org/10.51454/z7ysp660>
- Sunaini, W., & Satyadharma, M. (2025). Manajemen Talenta dan Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Suatu Kajian Literatur pada Sektor Publik Indonesia. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(2), 80–90. <https://scriptaintelektual.com/scripta-economica/user/setLocale/id?source=%2Fscripta-economica%2Farticle%2Fview%2F69>
- Sutrisno, E. R. (2022). Pelaksanaan Sistem Kerja Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Syafitri, N., Sari, D. P., Sumardin, S., Maizar, M., & Sabri, S. (2024). Pengaruh Pelatihan Berbasis Risiko Pada Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara. *Berajah Journal*, 4(8), 1481–1508. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i8.443>
- Syaipudin, L. (2025). Pengantar Penelitian Lapangan Sederhana Berbasis Jurnalistik (Kualitatif, Kuantitatif, R&D dan Studi Kepustakaan). Dawarmiyata Press LPPM STIE Al-Anwar.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wahyudi, H. (2025). Dasar-Dasar Teori Administrasi Negara: Perspektif Global dan Lokal. Jaka Maulana.
- Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Pemerintahan Daerah. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 9(4), 46–51. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.267>